



PENETAPAN

Nomor 1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 April 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXil.com sebagai **Pemohon I** ;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 07 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan petani pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 18 November 2024

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama XXXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 26 Juli 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXX, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 09 Juni 2004 (umur 20 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu ;
3. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Para Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan dengan alasan Menghindari Zina (calon suami anak Para Pemohon pernah menginap di rumah Para Pemohon);
4. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 14 November 2024, Nomor : XXX dengan alasan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa bagaimanapun Para Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara ;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alas an-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXX dan calon suaminya yang bernama XXXX, orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXX

- bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 26 Juli 2007, sekarang berumur 17 Tahun 4 Bulan dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX;
- bahwa status XXXX masih jejak dan belum pernah menikah;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXXX sejak 12 bulan yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dengan XXXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

## 2. XXXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXXX dan sekarang berumur 20 Tahun 5 Bulan;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXXX sejak 12 bulan yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membna rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 Januari 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Februari 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SD atas nama XXXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 14 November 2024 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai tetangga catin perempuan dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX akan menikah dengan XXXX;
- bahwa status XXXX adalah gadis dan XXXX masih jejaka;
- bahwa selama 12 bulan ini hubungan antara XXXX dengan XXXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXXX dan XXXX;
- bahwa keinginan XXXX dan XXXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXXX tidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXXX bekerja sebagai buruh harian lepas;

2. XXX, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai kakek catin laki-laki dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi



keterangan sebagai berikut :

- bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX akan menikah dengan XXXX;
- bahwa atatus XXXX adalah gadis dan XXXX adalah jejaka;
- bahwa selama 12 bulan ini hubungan antara XXXX dengan XXXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orang tua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXXX dan XXXX;
- bahwa keinginan XXXX dan XXXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dikarenakan umur XXXX tidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXXX bekerja sebagai buruh harian lepas;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar para Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.5) terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung XXXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, XXXX dan XXXX orang tua/wali calon suami anak para Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama XXXX sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;

- bahwa keinginan para Pemohon agar anaknya XXXX dapat segera menikah dengan XXXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi (bukti P.7) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta XXXX dengan XXXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa para Pemohon sebagai orangtua XXXX dan orangtua XXXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXXX bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXXX dengan XXXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk menikah dan XXXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ وَامَّا بَيْنَكُمْ وَأَمَّا بَيْنَنَا فَأَنْكِحُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.. sebagai Hakim Tunggal. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Subandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti PTA Surabaya yang ditugaskan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Subandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK
  - A. Penggandaan : Rp 30.000,00
  - B. Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00
- Sumpah : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

## Dicatat di sini :

- a. Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- b. Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Para Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 05 Desember 2024

Panitera Muda Permohonan,

**Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.**

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pent.No.1039/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)